

Laporan Kegiatan Diskusi

Agenda Pengorganisasian Diri dan Kesadaran Partisipasi Masyarakat Desa

Oleh: Wulani Sriyuliani¹ | 16 Mei 2011

Pengantar

Persoalan partisipasi masyarakat dan proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa menjadi isu menarik jika kita melihat dari sudut pandang *best practices*. Mana desa yang berhasil mengorganisasikan dirinya dan desa yang gagal (atau belum) berhasil dalam mengorganisasikan desanya sendiri. Berbagai ruang publik dibuka untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan menjembatani dialog dan aspirasi baik yang bersifat formal maupun informal. Hal ini pun sudah dicatatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara implisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Pada 25 April 2011, Pusat Analisis Sosial AKATIGA mengadakan diskusi bulanan yang berjudul '**Partisipasi yang Bermakna dan Efektif bagi Kelompok Miskin**'. Diskusi dihadiri oleh Badan Pembina AKATIGA, Perkumpulan Inisiatif, Ashoka, B-TRUST, Sentoro, Sommaci Cimahi, Jurusan Planologi UNIKOM, STKS Bandung, Himpunan Mahasiswa Planologi ITB, aktivis Serikat Buruh di Bandung. Kegiatan tersebut merupakan seri diskusi rutin dari rangkaian diskusi bulanan AKATIGA yang fokus untuk membahas isu-isu kemiskinan, perburuhan, usaha kecil dan tata pemerintahan (*governance*). Diskusi rutin dilakukan satu kali setiap bulannya dengan harapan dapat membuka ruang dialog bagi tiap peserta diskusi serta publikasi hasil diskusi yang informatif.

Diskusi yang dimulai pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, dihadiri narasumber Yusuf Murtiono Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) sebuah LSM di Kebumen yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui tata kelola pemerintah yang baik dengan perencanaan yang partisipatif dan pro-poor. Paparan narasumber yang berjudul "Kata Siapa Suara Kaum Marginal Tidak Berguna? Bukan Eksploitasi Tapi Bukti Nyata", berhasil memberikan gambaran umum pada peserta mengenai keberhasilan studi kasus partisipasi kelompok miskin dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa di Kebumen.

¹ Penulis adalah mahasiswi Pascasarjana jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran Bandung dan saat ini tercatat sebagai peneliti magang di AKATIGA.

Pendampingan mendorong partisipasi masyarakat desa

Presentasi dibuka dengan optimisme dan hasil positif yang sudah dicapai masyarakat desa Kebumen untuk menunjukkan efektifitas hasil proses pendampingan dan advokasi yang dilakukan pihak FORMASI. Hal tersebut ditunjukkan oleh Yusuf melalui pengalaman Yu Ngatemi (lulusan SD) sebagai perwakilan delegasi Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Musrenbangcam, Kang Dawal (lulusan SD) yang mampu menghipnotis dan menjelaskan mengenai isi tahapan proses penyusunan RPJMDesa pada tamu studi banding serta pengalaman Siti Masyirotun seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang kini duduk sebagai anggota Pokja Perencanaan Desa melalui proses rekrutmen yang transparan. Melalui ilustrasi tiga kasus diatas, dapat dilihat proses pendampingan FORMASI secara efektif mendorong partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

“Di Kebumen pasca 2007 lalu, sejak gerakan FORMASI ‘membangun desa’ ini mencapai beberapa tahap keberhasilan. Semua proses seleksi pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui seleksi ketat dan transparan,” ujar Yusuf. Melalui paparan tersebut, pembicara ingin menyampaikan perubahan positif dalam proses seleksi perangkat desa pasca pendampingan yang dilakukan FORMASI. Adanya perubahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis masyarakat desa telah menumbuhkan kembali kepercayaan dan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses musyawarah desa.

Hal utama yang menghambat tingkat partisipatif masyarakat desa adalah terjadinya konflik, baik yang bersifat simetris dan asimetris, antar masyarakat dan aparat desa. Pendefinisian konflik yang terjadi didesa bersifat dinamis dan relatif karena kondisi yang dihadapi masing-masing desa berbeda. Sedangkan hal yang perlu diapresiasi adalah kesadaran yang timbul dari masyarakat desa sendiri selama proses pendampingan dan advokasi.

Pembahasan mengenai kebijakan perencanaan dan penganggaran desa merupakan hal sensitif tapi kontekstual, termasuk dalam kasus perencanaan di Kebumen. Dalam paparan presentasi Yusuf terdapat tiga pembelajaran yang dapat ditarik. Pertama, selama ini pemahaman terhadap kebijakan pembangunan desa cenderung pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata. Sejak proses pendampingan dan advokasi yang dilakukan FORMASI, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa mulai memberikan perhatian pada anggaran kebutuhan masyarakat yang sifatnya non-fisik. Contohnya, bantuan transportasi untuk siswa dari keluarga miskin melalui anggaran pembelian sepeda ontel, bantuan kesehatan masyarakat melalui pembangunan jamban yang layak dan sehat,

pembagian alat kontrasepsi, tambahan makanan bergizi untuk balita dan juga lansia serta berbagai program yang dianggarkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) desa.

Kedua, masyarakat desa merasa dimanusiakan karena didengarkan aspirasinya dan diakui eksistensinya. Proses meningkatkan kesadaran dan sikap kritis pada masyarakat desa bukanlah hal mudah, terutama bagaimana merubah proses komunikasi antara aparat dengan masyarakatnya menjadi setara dan konstruktif. Hal ini merupakan pekerjaan kemanusiaan. Pendampingan dan advokasi mengenai kesadaran partisipasi masyarakat terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran desanya dengan otomatis mendorong penguatan kapasitas kelompok marginal.

Ketiga, FORMASI menunjukkan bahwa keberhasilan untuk mendampingi masyarakat desa memerlukan sikap sederhana, tidak sok tahu, tidak sok pintar, apalagi merasa sebagai '*jurul selamat*'. Sedangkan, untuk mendampingi aparat dibutuhkan sikap tegas dan fleksibel. Tegas terhadap tujuan akhir pendampingan dan fleksibel terhadap sistem prosedural aparat. Analogi menariknya, FORMASI tidak memberikan singkong, jika memang aparat terbiasa melahap jeruk, atau dalam istilah FORMASI '*melapisi singkong dengan kulit jeruk*'. Positifnya, melalui strategi yang fleksibel ini, FORMASI dapat membangun dan menjembatani proses dialog untuk kelompok masyarakat dan kelompok elit, sekaligus memperkecil kesenjangan jarak antar keduanya. Seperti yang diujarkan narasumber, "*[memang] pekerjaan LSM itu bukan pekerjaan teknokratis, tetapi bagaimanapun juga kemampuan teknokratis akan berguna ketika berhadapan dengan aparat atau elit dalam proses.*"

Pada dasarnya, paparan yang disampaikan diatas merupakan *sharing* pengalaman Yusuf Martono dalam memberikan pendampingan dan advokasi pada masyarakat marjinal di desa Kebumen. Kelompok ini seringkali dipinggirkan karena mayoritas tidak mengenyam pendidikan tinggi. Anggapan tidak berpendidikan tersebut yang kemudian mengecilkan kesempatan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran didesanya. Namun, sejak proses pendampingan dan advokasi, kesadaran masyarakat seolah tumbuh dan berkembang. Apalagi mengenai perasaan '*kepemilikan*' dan '*kepunyaan*' masyarakat terhadap desa. Isu pengorganisasian diri menjadi vital dalam proses pengembangan kesadaran partisipasi masyarakat.

Diskusi berlangsung hangat ketika dibuka sesi pertama untuk pertanyaan dan tanggapan peserta. Bapak Gunawan Wiradi dan Bapak Sediono Tjondronegoro (Badan

Pembina AKATIGA) yang memang mengikuti secara rutin diskusi AKATIGA, menyampaikan keingintahuannya terhadap strategi yang sudah dilakukan FORMASI untuk membangun dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan desa. Menurut Yusuf, selama proses pendampingan dan advokasi, penguatan kelompok masyarakat dan kelompok elit dapat dilakukan bersamaan. Strategi dibangun melalui penguatan hubungan kemitraan antara aparat desa dan masyarakat yang dijembatani FORMASI. Sedangkan, strategi awal untuk membangun kesadaran dan solidaritas masyarakat terhadap isu perencanaan dan penganggaran desa dapat menggunakan isu ekonomi.

Adanya ide pengurangan angka kemiskinan masyarakat yang dapat dikurangi melalui peningkatan peran masyarakat menjadikan persoalan partisipasi di Kebumen kontekstual. Yusuf menekankan adanya peningkatan partisipasi masyarakat pasca proses pendampingan oleh FORMASI. Hal tersebut sesuai pula dengan proses pendampingan dan advokasi tim percepatan pengentasan kemiskinan untuk merespon persoalan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat desa. Paparan diatas bertujuan untuk menjawab proses pendampingan FORMASI tidak menyalahi sistem perencanaan daerah/nasional.



Foto 1. Peserta Diskusi Partisipasi yang Bermakna dan Efektif bagi Kelompok Miskin

Selanjutnya, pada sesi pertanyaan yang kedua, salah satu peserta mengomentari paparan presentasi dengan skeptis, *"Pertanyaannya, saya belum melihat secara detail mengenai kinerja FORMASI yang berhasil itu memang betul atau tidak. Kalau saya melihat*

secara proses, FORMASI berhasil untuk mentransformasikan kemampuan desa untuk 'berbicara' tapi apakah FORMASI sudah menghasilkan ide (yang tentunya dapat ditambahkan dalam presentasi ini) karena sejauh ini saya masih melihat (presentasi) ini sebatas klaim". "Memang saya tidak mengakui" jawab Yusuf, "keberhasilan yang kita [Kebumen] capai saat ini adalah bukan kerja keras kami [FORMASI] semata. Kami pun bukan dewa penolong. Kerja keras ini merupakan buah Kebumen sendiri." FORMASI mengakui pencapaian yang diperoleh merupakan jerih payah masyarakat Kebumen sendiri.



Foto 2. Ruang Rapat AKATIGA dan Suasana Diskusi

Pada sesi pertanyaan ketiga, perdebatan tidak hanya memanas tapi mulai berbelok fokus pembahasan. Beberapa paparan pendapat peserta diskusi cenderung berbelit-belit. Salah satu ide menarik yang dapat digali dalam sesi terakhir ini adalah mengenai ide pengorganisasian diri. Pentingnya pengorganisasian diri dan isu partisipasi masyarakat miskin baik dalam isu apapun termasuk isu penganggaran desa ditekankan oleh Isono Sadoko, peneliti AKATIGA. *"Sebenarnya, apa peran pemerintah dan apa peran masyarakat?"* tanya Isono pada peserta diskusi, *"Jika kita memiliki waktu bertanya. Kapan kita perlu bertanya pada pemerintah? Kapan kita bertanya pada diri sendiri untuk ikut bergerak dan bertanggungjawab terhadap kondisi disekitar kita?"*. Ide ini tidak hanya berpusat pada pengorganisasian kelompok masyarakat yang memang erat dengan partisipasi tapi juga pengorganisasian diri secara individu untuk ikut bertanggungjawab. Pada intinya, pertanyaan diatas mendorong kita

tidak hanya untuk reflektif dan lebih peka terhadap situasi ketidakadilan yang dialami lingkungan terdekat, tapi juga mencoba untuk mendorong agar kita mau bergerak dengan memperbaiki ketidakadilan tersebut.

Sebagai penutup sesi terakhir tanya jawab, Yusuf Murtiono menyampaikan korelasi antara tingkat partisipasi dengan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat marjinal. Sejauh upaya yang sudah dilakukan FORMASI dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kondisi sistem anggaran yang pro pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Agenda pengorganisasian diri sebagai fondasi kesadaran partisipatif

Tentunya dalam proses diskusi diatas ditemui pula beberapa pertanyaan dan masukan, apakah paparan berhasil menjawab pertanyaan Terms of Reference (TOR) diskusi yaitu "*Apakah perencanaan partisipatif meningkatkan efektivitas penanggulangan upaya kemiskinan?*". Pertama, pemahaman terhadap partisipasi yang *bermakna* menuntut pertanggungjawaban. Apakah dengan membuka ruang publik, otomatis mendatangkan pula masyarakat yang meyuarkan aspirasi dan bermanfaat? Kedua, mengenai partisipasi *efektif* menuntut pemahaman apakah proses yang sudah dilalui masyarakat sesuai dengan tahapannya atau "*on the track*".

Paparan Yusuf mejabarkan bahwa melalui peningkatan partisipasi masyarakat membantu menanggulangi persoalan kemiskinan di desa. Perubahan arah kebijakan pendanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan dianggap menjawab aspirasi masyarakat selama ini. Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat di Kebumen secara otomatis mendukung kegiatan ekonomi desa agar lebih baik, dan juga meliputi pembelajaran mengenai sistem pengorganisasian masyarakat, serta pemahaman terhadap kultur dan adat yang berlaku di daerah tersebut agar sesuai dengan semangat partisipasi yang ada.

Melalui proses pendampingan dan advokasi FORMASI diharapkan sistem perencanaan dan partisipasi akan terus berlangsung. Salah satu capaian dengan adanya partisipasi masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan dengan pencapaian perbandingan presentase pembangunan yang bersifat infrastruktur dan non-infrastruktur (non-fisik) yang mencapai 60 persen dan 40 persen. Sebelum proses pendampingan (atau tepatnya sebelum masyarakat mulai berani untuk menyampaikan aspirasi publiknya), anggaran pembiayaan dana desa didominasi oleh agenda pembangunan infrastruktur. Hal tersebut pula seringkali dikeluhkan masyarakat desa karena tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari

pembangunan infrastruktur yang dianggap salah sasaran. Sejak proses pendampingan yang bermakna dan efektif ini, masyarakat desa Kebumen dapat 'menyetir' agenda perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penutup

Paparan diatas memperlihatkan bagaimana keberhasilan proses pendampingan dan advokasi dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat desa. Pertanyaan kemudian, apakah kesadaran partisipasi tersebut dapat dipertahankan jika proses pendampingan dan advokasi berakhir? Apakah masyarakat sudah cukup mandiri untuk maju pada langkah proses partisipasi selanjutnya yang lebih bermakna dan efektif?

"Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya merumuskan sistem yang berkelanjutan walaupun suatu hari nanti FORMASI tidak ada lagi. Sistem yang sudah dibangun saat ini harus terus ada," ujar Yusuf sebagai penutup paparan presentasinya. Perlu diingat, capaian masyarakat desa Kebumen saat ini merupakan keberhasilan bersama. Strategi penyadaran terhadap tanggungjawab dan rasa kepemilikan desa belum selesai dan masih harus diperjuangkan. Dengan membuka ruang publik dan mendorong dialog merupakan mekanisme efektif untuk mengorganisasikan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya segala bentuk persoalan yang dihadapi partisipasi masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa hingga kemiskinan struktural terhubung oleh persoalan pengorganisasian diri. Pengorganisasian diri tersebut dapat dilakukan individu maupun kelompok. Tindakan reflektif tersebut merupakan titik tolak segala kesadaran individu, termasuk kesadaran kelompok miskin desa untuk ikut berpartisipasi secara bermakna dan efektif.